

# BAB II

## **GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA**

[anikwidiastuti@uny.ac.id](mailto:anikwidiastuti@uny.ac.id)

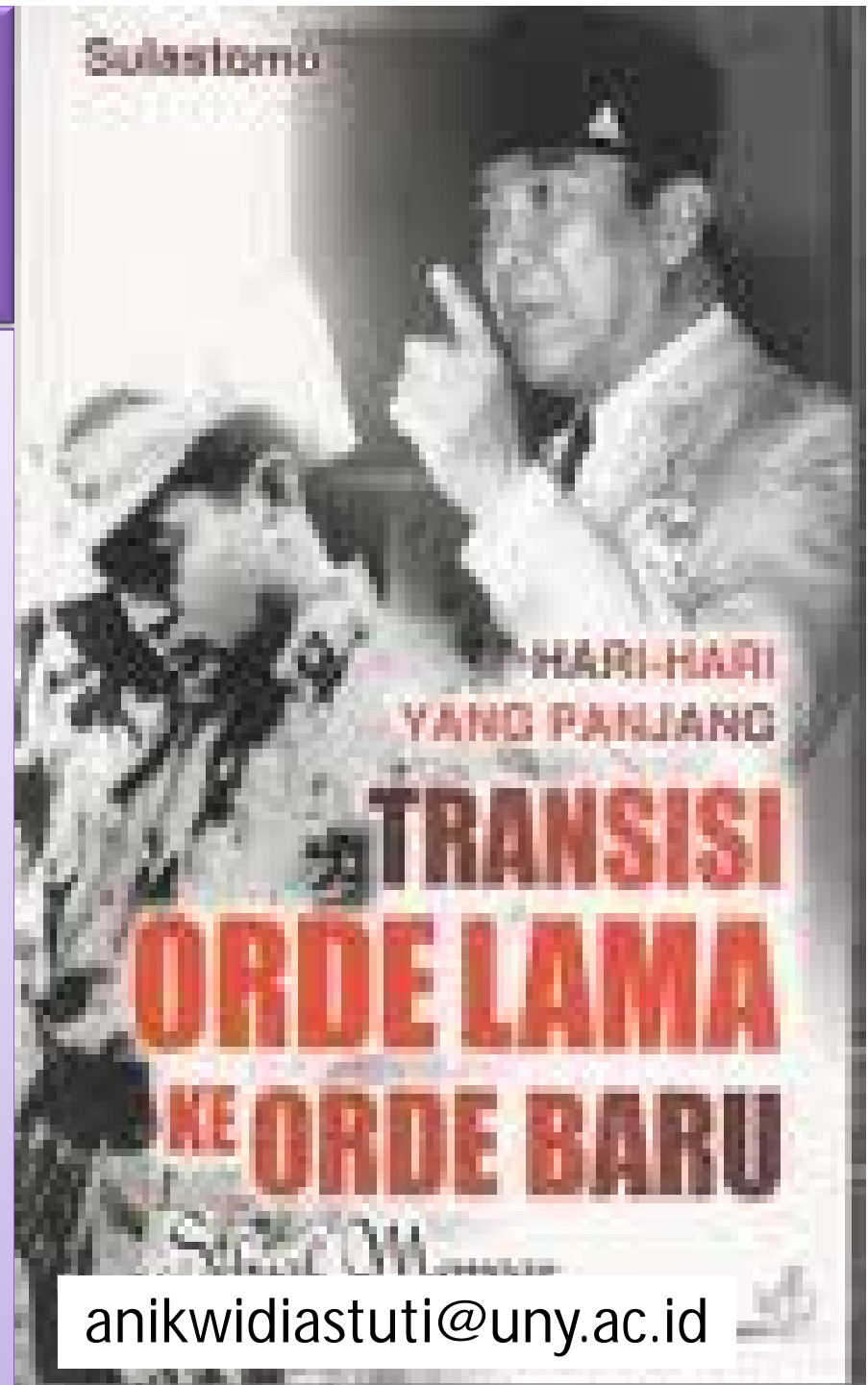


# TUJUAN PERKULIAHAN

Mampu mendeskripsikan  
kondisi perekonomian pada  
masa orde lama

# ERA SEBELUM 1966 (ORDE LAMA)

- 20 Th pertama perekonomian kurang berkembang baik
- Sistem politik tidak stabil  
→ sering ganti kabinet
- Kebijakan ekonomi sering berubah
- Defisit anggaran pemerintah membengkak
- Harga membubung
- Inflasi s/d 650% 1966  
→ hiperinflasi



# ORDE LAMA

- Nasionalisasi perusahaan asing
- Kebijakan anti investasi asing
- Pangsa pasar komoditas perdagangan internasional banyak yang hilang
- Depresiasi rupiah
- Th 1958 → BEJ ditutup
- Keluar dari IMF
- Penerimaan ekspor <10% PDB
- Penggabungan bank → **bank berjuang** sbg pelaksana gagasan ekonomi terpimpin

# ORDE BARU



## MASA PERALIHAN (1966-1968)

- Orde baru mewarisi keadaan perekonomian:
- Tidak mampu membayar utang LN US \$ 2M
- Ekspor = ½ impor
- Tidak mampu mengendalikan anggaran belanja
- Laju inflasi 30-50% per bulan
- Prasarana ekonomi buruk
- Kapasitas produksi sektor industri & ekspor menurun



# MASA PERALIHAN

- Kebijakan yg ditempuh:
  1. memerangi hiperinflasi
  2. Mencukupkan stok pangan (beras)
  3. Rehabilitasi sarana perekonomian
  4. Meningkatkan ekspor
  5. Menciptakan lapangan kerja
  6. Mengundang kembali investasi asing
  7. IGGI=negara donatur
  8. Kebijakan anggaran berimbang
  9. Reformasi perbankan → masuk IMF lagi



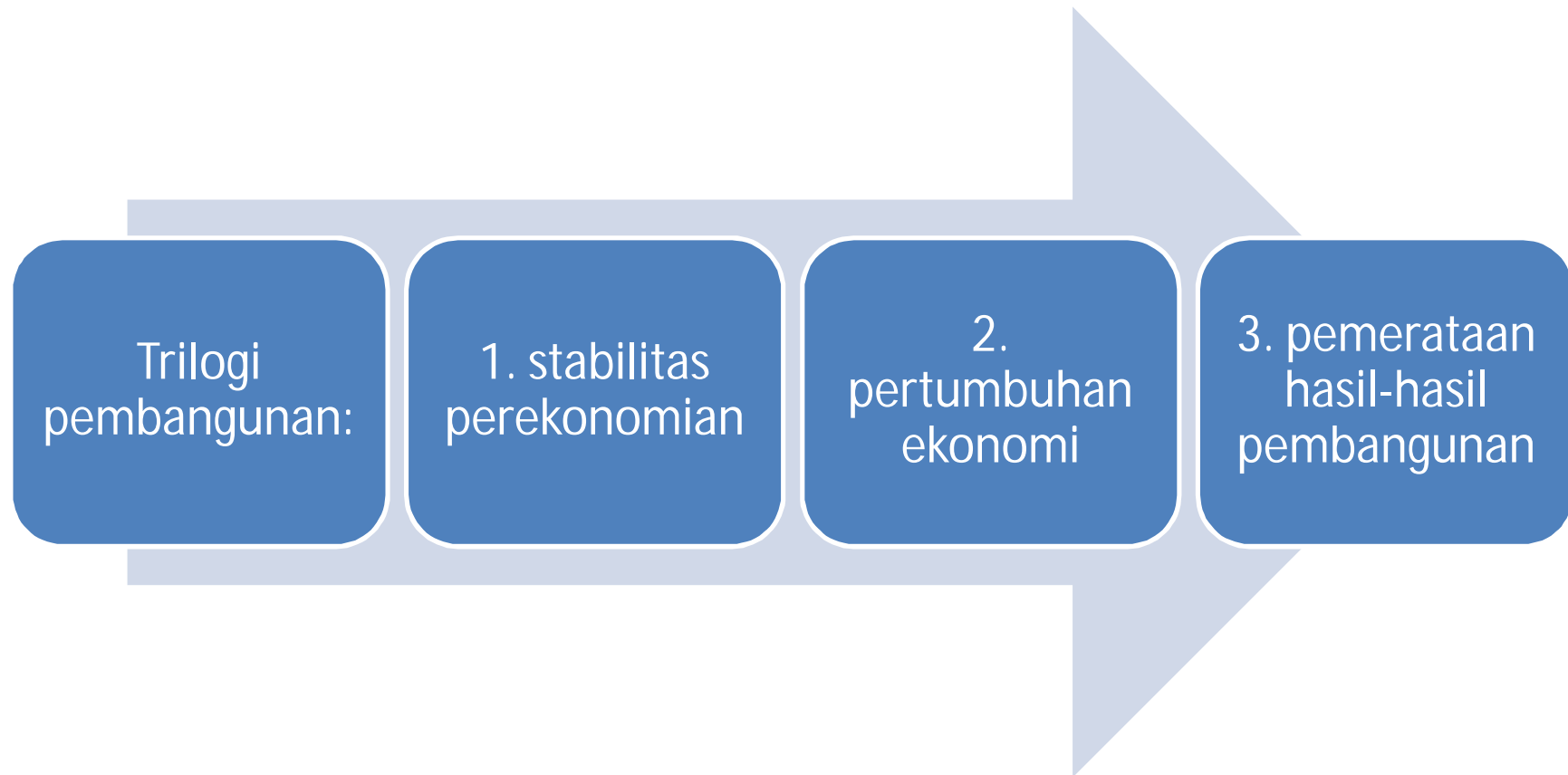
# MASA PERALIHAN

## PROGRAM EKONOMI ORDE BARU:

- Jangka pendek (Pelita)
- Jangka panjang (PJP)

# PELITA

## (Pembangunan Lima Tahun)







## PELITA I&I (April 1969)

- Perekonomian tumbuh 7% per tahun
- Th 1973: boom minyak
- Anggaran pemerintah tergantung pajak minyak , bantuan & utang LN
- Rupiah didevaluasi 50%
- Impor nonmigas meningkat terus → surplus neraca berjalan menjadi defisit

# PELITA III

## Kebijakan perekonomian dipertegas:

- Anggaran belanja diperketat
- Ekspor turun → pinjaman LN ditambah
- Menggalakkan ekspor nonmigas
- Membatasi impor barang mewah
- Mengurangi perjalanan ke LN
- Menggalakkan penggunaan produk DN



anikwidiastuti@uny.ac.id

# PELITA IV

- Meneruskan debirokratisasi & deregulasi
- Perekonomian lebih diliberalkan
- Peran swasta ditambah
- Merangsang investasi asing
- 1986: rupiah didevaluasi utk menggenjot ekspor nonmigas
- Awal 1984: swasembada beras
- Pasar modal & sektor perbankan berkembang pesat

# PELITA V

- Indonesia → negara industri baru
- Paket deregulasi dlm bentuk UU: tentang koperasi, perbankan, perpajakan
- Pertumbuhan rata-rata 6,7% per tahun
- Ekspor nonmigas meningkat pesat
- Menekan ekonomi biaya tinggi
- Pakto '88 → paket deregulasi perbankan

# KABINET HATTA

## (Des '49 – Sept '50)

- Konsentrasi: penyatuan politis wilayah Indonesia dalam RIS
- Revaluasi moneter melalui devaluasi mata uang secara serempak & pemotongan uang yg beredar pada Maret '50 → uang keluaran De Javasche Bank yg bernilai >2,5 gulden Indonesia
- Pengurangan deposito bank yg bernilai > 400 gulden mjd separuhnya → pemegang deposito diganti rugi dg obligasi jangka panjang pemerintah



## KABINET NATSIR (SEPT '50 – MAR '51)

- Menteri Keuangan: Sjarifudin Prawiranegara
- Menteri perdagangan & industri: Sumitro Djojohadikusumo
- Ekspor meningkat → mengatasi kesulitan neraca pembayaran, penerimaan pemerintah meningkat
- Impor diliberalisasikan → utk menekan tingkat harga umum DN
- Kredit bagi perusahaan asing diperketat, bagi perusahaan DN diperlunak
- Th 1951: Surplus anggaran
- Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) → dilanjutkan kabinet berikutnya

[anikwidiastuti@uny.ac.id](mailto:anikwidiastuti@uny.ac.id)



## **KABINET SUKIMAN (April 1951-Februari 1952)**

- Nasionalisasi De Javasche Bank mjd Bank Indonesia
- Situasi fiskal memburuk
- Ekspor menurun
- Peghapusan sistem kurs berganda
- Surplus anggaran Kabinet Natsir mjd defisit

[anikwidiastuti@uny.ac.id](mailto:anikwidiastuti@uny.ac.id)

# KABINET WILOPO (April 1952-Juni 1953)



- Wilopo: Menteri Urusan perekonomian pada Kabinet Sukiman → konsep anggaran berimbang (*balanced budget*)
- Impor diperketat dg cara harus melakukan pembayaran di muka
- Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi & pengurangan personil
- Mampu menekan pengeluaran pemerintah s/d 25%
- Cadangan devisa merosot tajam
- **Program Benteng**: membentuk kelas menengah nasional dg membatasi alokasi impor kpd pengusaha nasional → diskriminatif & rasial shgg pengusaha non pribumi dirugikan



# KABINET ALI (Agustus 1953-Juli 1955)



- Dipimpin: Ali Sastroamidjojo
- Defisit anggaran belanja & neraca pembayaran
- Menteri Urusan Perekonomian: Iskaq Tjokroadisurjo → penganjur Indonesianisasi plg gigih
- Melindungi importir pribumi → importir benteng melonjak
- Reshuffle kabinet → kondisi tidak stabil → pembatasan impor
- Pengendalian uang beredar kurang sukses



## KABINET BURHANUDDIN (Agustus 1955-Maret 1956)

- Krisis kabinet → Hatta sbg Wapres menunjuk Burhanuddin utk membentuk kabinet → disebut kabinet interim
- Liberalisasi impor (politik rasialisme trhdp importir dihapuskan)
- Laju uang beredar dapat ditekan 5%
- Nilai rupiah naik 8% trhdp emas
- Harga barang eks impor turun
- Membentuk Dewan Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
- Modal asing tetap diijinkan → pengusaha Indonesia pribumi diberi bantuan
- Membatalkan keputusan KMB → di mana perusahaan Belanda mendominasi perekonomian

# KABINET ALI II

## (April 1956-Maret 1957)

- Kabinet I hasil pemilu
- Banyak penyelundupan → cadangan devisa merosot
- Utang pada belanda dihapuskan
- Dapat bantuan IMF US \$55juta
- Diberlakukan UU anti pemogokan & anti pemilikan tanah secara tidak sah → utk melindungi perkebunan yg banyak dioperasikan asing
- Program Benteng dihentikan presiden soekarno krn tdk mendapat perhatian kabinet
- Membuat konsep pembangunan baru: rencana lima tahun (RLT): dipimpin Ir. Djuanda → tujuan: mendorong industri dasar, jasa-jasa pelayanan umum & sektor publik agar merangsang penanaman modal swasta



# KABINET DJUANDA (Maret 1957-Agustus 1959)

- Djuanda Kartawidjaja: Menti Perencanaan dalam kabinet Ali II
- Disebut **kabinet karya** krn dibentuk bukan karena politis kepartaian
- Disebut juga **kabinet kerja darurat ekstra parlementer**: krn dibentuk presiden pada pemberlakuan perang & darurat perang
- Perekonomian terpimpin
- Pengambilalihan/nasionalisasi perusahaan belanda
- Defisit anggaran s/d 5,5 M
- Upaya kabinet banyak pada pengembalian Irian Barat
- Pergolakan politik → memicu inflasi & mengganggu penanaman modal, distribusi & produksi

[anikwidiastuti@uny.ac.id](mailto:anikwidiastuti@uny.ac.id)



# MASA KEPEMIMPINAN SBY

[anikwidiastuti@uny.ac.id](mailto:anikwidiastuti@uny.ac.id)

# 3 STRATEGI YANG MENDASAR

- PRO POOR
- PRO JOB
- PRO GROWTH



# PROGRAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN RAKYAT MELALUI 3 KLASTER

- Klaster 1 → ibarat pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin yang membutuhkan bantuan perlindungan sosial.
- Klaster 2 → ibarat memberi kail agar masyarakat lebih mandiri
- Klaster 3 → ibarat memberikan perahu

# Klaster 1

- “ibarat pemberian ikan bagi rakyat miskin”
- Memberi bantuan kepada keluarga kurang mampu/kelompok sasaran: raskin, program keluarga harapan (PKH)/bantuan langsung bersyarat, BOS, bantuan lansia dan cacat ganda terlantar, bantuan bencana alam,, BLT, beasiswa anak dari rumah tangga sasaran.





## KLASTER 2

- “ibarat memberi kail agar masyarakat lebih mandiri”
- Menggulirkan program dan anggaran berbasis masyarakat yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) mandiri → pendampingan desa yang masih memiliki kelompok miskin. Masyarakat diberdayakan untuk memanfaatkan fasilitas sesuai kebutuhan desanya untuk membangun infrastruktur fisik/sosial

# KLASTER 3

- “ibarat memberikan perahu”
- Meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk iklim berusaha dan penyediaan kredit usaha rakyat (KUR)